



Akselerasi Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kebijakan Anggaran Berkeadilan: Pendekatan Gender di Pemerintah Daerah

Muhammad Ihsan Ansari^{1*}, Indra Basir²

AFILIASI:

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Sulawesi Barat

*KORESPONDENSI:

ihsan@unsulbar.ac.id

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN:

<https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: [10.32534/jpk.v12i4.7951](https://doi.org/10.32534/jpk.v12i4.7951)

CITATION:

Akselerasi Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kebijakan Anggaran Berkeadilan: Pendekatan Gender di Pemerintah Daerah. (2025). Jurnal Proaksi, 12(4), 609-627. <https://doi.org/10.32534/jpk.v12i4.7951>

Riwayat Artikel :

Artikel Masuk:
2 September 2025

Di Review:
18 September 2025

Diterima:
15 November 2025

Abstrak

Tujuan Utama - Penelitian ini bertujuan memahami integrasi perspektif gender dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Majene

Metode - Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif dengan analisis wacana kebijakan yang diterapkan melalui studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen perencanaan dengan informan kunci dari birokrasi penganggaran daerah

Temuan Utama - Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan pengarusutamaan gender, pelaksanaan ARG di Majene masih terhambat oleh resistensi kelembagaan serta keterbatasan kapasitas dan pemahaman tentang perspektif gender. Partisipasi perempuan dalam proses penganggaran masih rendah, sehingga alokasi anggaran daerah belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan gender. Temuan lain menegaskan perlunya peningkatan efektivitas kebijakan ARG agar pelaksanaannya lebih inklusif

Implikasi Teori dan Kebijakan - Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas institusi dan literasi gender sebagai strategi untuk memperkuat pelaksanaan ARG di daerah. Penelitian ini juga berkontribusi pada literatur kebijakan dengan memberikan rekomendasi spesifik untuk meningkatkan efektivitas ARG demi mencapai kesetaraan gender yang lebih inklusif

Kebaruan Penelitian - Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap hambatan dan peluang penerapan ARG di tingkat daerah

Kata Kunci: Anggaran Responsif Gender (ARG), Sustainable Development Goals (SDGs), Kesetaraan Gender, Analisis Wacana Kebijakan Pembangunan inklusif

Abstract

Main Purpose - This study aims to understand how gender perspectives are integrated into the formulation of the local government budget (APBD) in Majene Regency.

Method - The research employs a qualitative approach using policy discourse analysis within a case study design. Data were collected through in-depth interviews and analysis of planning documents with key informants from the local budgeting bureaucracy

Main Findings - The findings indicate that, despite formal gender mainstreaming policies, the implementation of gender-responsive budgeting (GRB) in Majene is constrained by institutional resistance and limited capacity and understanding of gender perspectives. Women's participation in the budgeting process remains low, resulting in budget allocations that are not fully responsive to gender needs. The study further underscores the need to enhance the effectiveness of GRB policies to ensure more inclusive implementation

Theory and Practical Implications - The results highlight the necessity of strengthening institutional capacity and gender literacy as strategies to advance GRB implementation at the local level. The study also contributes to the policy literature by offering specific recommendations to improve GRB effectiveness in achieving more inclusive gender equality outcomes

Novelty - The novelty of this research lies in its in-depth analysis of the barriers and opportunities of GRB implementation at the subnational (district) level

Keywords: Gender Responsive Budgeting (GRB), Sustainable Development Goals (SDGs), Gender Equality, Policy Discourse Analysis, Inclusive Development

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global melalui kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pembangunan secara terpadu (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Salah satu tujuan penting dalam SDGs adalah mencapai *kesetaraan gender* (Tujuan 5), yang diakui sebagai prasyarat untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan (Leal Filho et al., 2023). Namun, hingga kini upaya menuju kesetaraan gender di tingkat global masih menghadapi tantangan serius, terlihat dari berlanjutnya ketimpangan gender di berbagai negara (Dello Strologo et al., 2023). Kesetaraan gender sendiri berarti perempuan dan laki-laki memiliki kondisi yang setara dalam memperoleh hak, kesempatan, berpartisipasi dalam pembangunan, serta menikmati hasilnya secara adil (United Nations, 2020) ini merupakan bagian dari hak asasi manusia dan menjadi prioritas dunia (UNESCO, 2019), sehingga mendorong komitmen negara-negara untuk mengambil tindakan nyata hingga tingkat lokal (UN DESA, 2024). Dengan demikian, dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan komunitas setempat dalam mengakselerasi pencapaian target kesetaraan gender (Mishra et al., 2023)

Pada tataran nasional, Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap isu kesetaraan gender melalui kebijakan *Pengarusutamaan Gender* (PUG) dan penerapan *Gender Responsive Budgeting* atau *Anggaran Responsif Gender* (ARG) dalam perencanaan pembangunan. Kerangka regulasi nasional dibentuk sejak Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG, yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan, program, dan anggaran pembangunan (Indonesia, 2000). Tindak lanjutnya, pemerintah menerbitkan berbagai aturan teknis seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah serta Permendagri No. 67 Tahun 2011 yang memberikan pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi pemerintah daerah. Selain regulasi, disediakan pula instrumen teknis seperti *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) yang diintegrasikan ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran untuk memastikan kebutuhan perempuan dan laki-laki terakomodasi secara adil (Widowati et al., 2016). Melalui pendekatan ARG ini, diharapkan alokasi sumber daya dalam APBN/APBD menjadi lebih tepat sasaran dan efektif mendukung pencapaian kesetaraan gender (Khalifa & Scarparo, 2021; Steccolini, 2019). Meskipun kerangka kebijakan telah ada, implementasi ARG di banyak daerah masih belum optimal karena keterbatasan pemahaman dan kapasitas aparatur dalam melakukan analisis gender, sehingga anggaran yang disusun belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan (Siswiraningtyas & Yuhertiana, 2021)

Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat menjadi locus yang menarik untuk mengkaji ARG pada level lokal. Pemerintah Kabupaten Majene telah menunjukkan komitmen melalui lahirnya regulasi daerah, antara lain *Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2021* tentang Pengarusutamaan Gender dan *Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2022* tentang Pelaksanaan ARG, serta mulai mengintegrasikan instrumen GAP dan GBS dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Namun, kondisi empiris menunjukkan kesenjangan gender masih nyata. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Majene tercatat sekitar 94,17 (skala 0–100) pada tahun 2021, yang mencerminkan kualitas hidup perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki di berbagai sektor pembangunan (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2023). Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan anggaran juga relatif rendah, sehingga banyak program dan belanja daerah belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan spesifik gender (Ansari & Basir 2024). Di lapangan, implementasi ARG masih terkendala oleh terbatasnya pemahaman dan kapasitas sebagian pemangku kepentingan dalam menganalisis isu gender, lemahnya koordinasi lintas-organisasi perangkat daerah, serta kurangnya data terpilah menurut gender untuk perencanaan (Siswiraningtyas & Yuhertiana 2021) Kondisi lokal Majene ini

merefleksikan tantangan umum yang dihadapi banyak daerah dalam menerapkan anggaran yang berkeadilan gender.

Meskipun berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan, terdapat *research gap* (kesenjangan penelitian) yang mendasari pentingnya studi ini. Secara akademis, kajian implementasi ARG di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) masih sangat terbatas, karena sebagian besar studi terdahulu berfokus pada level nasional atau provinsi. Hal ini menyisakan ruang penelitian mengenai bagaimana ARG bekerja dalam konteks pemerintah kabupaten yang belum banyak dijelajahi. Secara kebijakan, Kabupaten Majene memang telah memiliki landasan regulasi PUG dan ARG, namun efektivitas pelaksanaannya belum terbukti optimal; regulasi lokal yang ada belum mampu secara penuh menjawab persoalan ketimpangan gender di tataran implementasi. Secara empiris, kesenjangan antara kebijakan dan realitas tercermin dari masih rendahnya pencapaian indikator-indikator kesetaraan gender seperti IPG Majene yang belum mendekati paritas meskipun berbagai program dan regulasi telah dijalankan ([Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, 2023](#)). Ketiga aspek *gap* tersebut menunjukkan perlunya penelitian mendalam di tingkat lokal untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen kebijakan formal dan capaian empiris kesetaraan gender melalui ARG. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin menganalisis bagaimana implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kabupaten Majene dalam mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan berbasis kesetaraan gender.

KAJIAN PUSTAKA

Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal (SDGs)*

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia tanpa merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri ([Brundtland, 1987](#)). Menurut [Alisjahbana and Murniningtyas \(2018\)](#), pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan tiga pilar utama ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terkait dan berkesinambungan. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, Indonesia sebagai negara berkembang turut berkomitmen untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015. SDGs mencakup 17 tujuan, di antaranya penghapusan kemiskinan, kesetaraan gender, pendidikan berkualitas, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ([United Nations, 2020](#)). Pencapaian SDGs menuntut sinergi kebijakan nasional lokal dan tata kelola yang akuntabel ([UN DESA, 2024](#)).

Namun, meskipun tujuan SDGs mencakup dimensi yang sangat luas, masih terdapat tantangan besar dalam pencapaian kesetaraan gender, khususnya di tingkat daerah, yang seringkali dihadapkan pada ketimpangan sosial dan ekonomi. Menurut ([Dello Strologo et al, 2023](#)) pencapaian kesetaraan gender adalah salah satu elemen kunci dalam pembangunan berkelanjutan yang sering terabaikan dalam kebijakan pembangunan, terutama di negara berkembang.

Pembangunan berkelanjutan menjadi pendekatan fundamental dalam merumuskan kebijakan di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan menekankan sinergi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. SDGs melalui keempat dimensi utama (pembangunan manusia, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola) merupakan kerangka global untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang ([Mishra et al. 2023](#)). Implementasi kebijakan yang selaras dengan SDGs, seperti integrasi tujuan keberlanjutan ke dalam RPJMD, penting untuk mengakar visi pembangunan nasional dan daerah secara efektif ([Alisjahbana & Murniningtyas, 2018](#)). Selain itu, sinergi antara kebijakan ekonomi dan lingkungan dinilai penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan, di mana inovasi seperti subsidi energi terbarukan dan pajak karbon memiliki potensi memperkuat integrasi kebijakan lintas sektor ([Pratama et al., 2024](#)).

Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Untuk memastikan pembangunan daerah yang **inklusif** dan **berkeadilan gender**, pemerintah menerapkan strategi *pengarusutamaan gender* (PUG) dalam kebijakan, program, dan kegiatan. PUG mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan (Nurhaeni, 2017). Melalui PUG, diharapkan kebijakan publik dapat mengatasi ketimpangan peran dan akses antara perempuan dan laki-laki. Salah satu instrumen fiskal utama dalam mewujudkan PUG adalah **Anggaran Responsif Gender (ARG)**, atau dikenal juga secara global sebagai *Gender Responsive Budgeting (GRB)*. ARG bukan sekadar menyediakan anggaran khusus bagi perempuan, melainkan memastikan bahwa analisis gender diterapkan secara menyeluruh dalam seluruh siklus anggaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi (Khusaini, M & Ashar, K. 2021). Dengan kata lain, ARG berupaya mensinergikan prioritas pembangunan dengan kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan, sehingga alokasi sumber daya lebih adil dan efektif mengurangi kesenjangan gender

Implementasi ARG menuntut dukungan kapasitas teknis, sistem data yang memadai, serta komitmen politik yang kuat (Listiawati et al., 2025). Studi lintas negara menunjukkan keberhasilan ARG sangat dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan tata kelola, antara lain koordinasi antarsektor, kemampuan aparat dalam melakukan gender analysis, serta integrasi ARG ke dalam kerangka **Public Financial Management (PFM)** termasuk mekanisme budget tagging (Jorge et al, 2023) Peran pengawasan dan audit eksternal juga krusial untuk memastikan ARG dilaksanakan sesuai tujuan; misalnya, temuan Audit Office di Andalusia menunjukkan pentingnya audit mengawal penerapan dan hasil GRB (López-Hernández et al., 2023). Di tingkat organisasi, pemetaan program dan pelibatan pemangku kepentingan secara proaktif terbukti diperlukan agar ARG tidak sekadar menjadi kepatuhan administratif, melainkan benar-benar mendorong perubahan kebijakan yang berdampak (Oppi, 2021). Dengan demikian, literatur menegaskan bahwa ARG efektif bila didukung tata kelola anggaran yang sensitif gender, mulai dari ketersediaan data terpilah untuk analisis, kapasitas sumber daya manusia, hingga koordinasi lintas sektor yang solid.

Anggaran Responsif Gender (ARG) sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal

Salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender adalah dengan menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG) atau *Pro Gender Budgeting* (PGB). ARG adalah pendekatan penganggaran yang menyoroti kebutuhan laki-laki dan perempuan agar anggaran publik dapat berperan dalam mengurangi ketimpangan gender secara efektif. Prinsipnya bukan sekadar menyediakan anggaran khusus untuk perempuan, melainkan memastikan analisis gender digunakan secara menyeluruh dalam setiap tahapan anggaran mulai perencanaan hingga evaluasi (Khusaini, M., Ashar, K., 2021). Implementasi ARG memerlukan kapasitas teknis, sistem pemantauan, dan komitmen politik yang kuat (Listiawati et al., 2025). Bukti lintas negara menunjukkan bahwa efektivitas ARG bergantung pada struktur kelembagaan, koordinasi antarsektor, kemampuan menyusun analisis gender, serta integrasi dengan kerangka penganggaran jangka menengah dan mekanisme *budget tagging* (Jorge et al, 2023; Morshed & Lim 2023). Peran pengawasan eksternal juga penting misalnya temuan Audit Office of Andalusia untuk memastikan implementasi dan hasilnya (López-Hernández et al., 2023). Pada tingkat kota/organisasi dan pendidikan tinggi, studi menunjukkan pentingnya pemetaan program dan *stakeholder engagement* agar ARG tidak sekadar kepatuhan administratif (Oppi et al, 2021).

Penelitian studi kasus di Indonesia dan negara lain menunjukkan bahwa efektivitas ARG sangat bergantung pada struktur kelembagaan, koordinasi antar sektor, dan kemampuan region menyusun analisis gender; (Siswiraningtyas and Yuhertiana. 2021). Selain itu, di beberapa kabupaten seperti Temanggung dan Kendal, hasil implementasi ARG masih terbatas karena kurangnya pemahaman dan komitmen dari birokrat serta tidak ada perda yang mengatur anggaran responsif gender (Pahlevi et

al, 2018). Sementara itu, di Probolinggo, penyusun anggaran memahami ARG secara teknis terbatas dan menghadapi resistensi karena ketiadaan regulasi daerah yang mendukung (*Widowati et al, 2016*).

Variasi Implementasi ARG di Berbagai Daerah

Pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa konteks lokal sangat menentukan efektivitas penerapan ARG. Penelitian kasus di Indonesia dan negara lain menegaskan perlunya struktur kelembagaan yang mendukung, koordinasi antarsektor yang kuat, serta kapasitas analisis gender di tingkat daerah untuk mencapai hasil ARG yang optimal (*Siswiraningtyas & Yuhertiana 2021*). Sebagai contoh, studi di Kabupaten **Temanggung** dan **Kendal** menemukan bahwa implementasi ARG di sana masih **sangat terbatas**. Keterbatasan tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan komitmen para birokrat lokal terhadap konsep anggaran responsif gender, ditambah ketiadaan **regulasi daerah** yang secara spesifik mengatur pelaksanaan ARG (*Pahlevi, M.A.A., & Alfirdaus, 2018*). Tanpa landasan hukum dan pemahaman yang memadai, inisiatif ARG di dua kabupaten tersebut cenderung berjalan formalitas dan tidak berkelanjutan. Sementara itu, di Kota **Probolinggo**, meskipun upaya ARG telah mulai diperkenalkan, para penyusun anggaran di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diketahui hanya memahami konsep ARG secara teknis terbatas. Mereka juga menghadapi resistensi internal dalam proses penganggaran, yang sebagian disebabkan oleh tidak adanya peraturan daerah yang jelas sebagai payung hukum ARG (*Widowati et al, 2016*). Kasus Probolinggo ini mencerminkan bahwa tanpa dukungan regulasi dan pemahaman menyeluruh, ARG rentan ditolak atau diabaikan sebagai beban tambahan.

Perbandingan berbagai daerah tersebut menunjukkan **variasi konteks dan praktik** ARG yang penting dipertimbangkan. Di satu sisi, keberadaan regulasi lokal (misalnya peraturan daerah/PERDA tentang PUG atau ARG) dapat menjadi pendorong komitmen formal pemerintah daerah terhadap kesetaraan gender. Namun, literatur mencatat bahwa aturan formal saja tidak menjamin perubahan nyata apabila tidak disertai peningkatan pemahaman dan kapasitas aparatur pelaksana (*Alisjahbana & Murniningtyas 2018*). Di banyak daerah, kesenjangan antara komitmen kebijakan dan implementasi teknis masih besar: koordinasi lintas-OPD sering lemah, data terpisah gender kurang tersedia, dan evaluasi cenderung terbatas pada indikator kuantitatif (*Darwanis, 2015*). **Koordinasi antar-OPD** terutama menjadi elemen krusial; tanpa koordinasi yang efektif, ARG berisiko terfragmentasi dan hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, alih-alih menghasilkan *outcome* nyata (*Jorge et al., 2023*). Penelitian di berbagai konteks menggarisbawahi bahwa kolaborasi lintas sektor diperlukan agar sektor non-sosial (misalnya infrastruktur atau ekonomi) turut mempertimbangkan perspektif gender dalam penganggaran, bukan hanya sektor kesehatan atau pendidikan saja (*Sudirman, F.A & Susilawaty 2022*). Dengan demikian, tantangan implementasi ARG bersifat multidimensional, bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan data dan sistem, komitmen politik, serta kultur birokrasi di masing-masing daerah.

Urgensi Penelitian tentang ARG di Kabupaten Majene

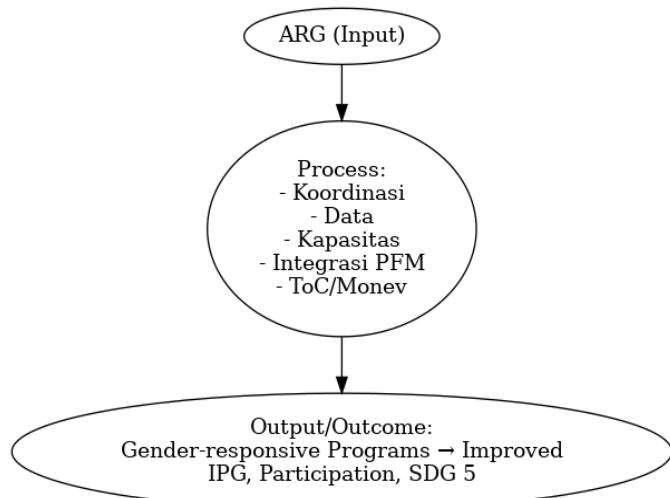
Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana kebijakan anggaran berbasis ARG dapat mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks kesetaraan gender di Kabupaten Majene. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana kebijakan anggaran yang inklusif dan responsif gender dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam pencapaian kesetaraan gender, serta bagaimana penerapan ARG dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Majene dalam merancang kebijakan anggaran yang lebih adil dan berkeadilan gender, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian SDGs di tingkat lokal.

Kabupaten **Majene** di Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah yang berupaya mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan pembangunannya. Majene telah memiliki kerangka kebijakan formal untuk PUG, antara lain dengan ditetapkannya [Peraturan Daerah Kabupaten Majene No. 6 Tahun 2021](#) tentang PUG dan [Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2022](#). Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi implementasi ARG di tingkat daerah. Secara operasional, Majene juga mulai menerapkan alat analisis gender seperti *Gender Analysis Pathway (GAP)* dan *Gender Budget Statement (GBS)* ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah (Renja-RKA serta KUA-PPAS). Langkah-langkah ini menandai adanya **kemajuan formal** dan komitmen awal pemerintah daerah dalam memasukkan perspektif gender ke kebijakan fiskal. Sejalan dengan itu, sektor-sektor seperti kesehatan dan pendidikan di Majene mulai merancang program yang lebih responsif gender, misalnya penyesuaian layanan kesehatan ibu-anak agar lebih ramah bagi perempuan dari kelompok rentan.

Meskipun demikian, pertanyaan kritisnya adalah sejauh mana komitmen dan inovasi kebijakan tersebut benar-benar **terkonversi** menjadi praktik penganggaran yang efektif dan mampu mempercepat pencapaian kesetaraan gender di Majene. Berdasarkan pengalaman daerah lain, Majene kemungkinan menghadapi tantangan serupa, seperti keterbatasan **data terpilih** (data yang mengungkap kondisi laki-laki dan perempuan secara terpisah), kapasitas analitis yang belum merata di antara aparatur daerah, serta mekanisme koordinasi antar-OPD yang perlu diperkuat. Hambatan-hambatan struktural dan teknis ini dapat mengurangi efektivitas ARG jika tidak diantisipasi. Oleh karenanya, penelitian mengenai implementasi ARG di Majene menjadi **urgens** untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya menggali sejauh mana kebijakan anggaran yang inklusif dan responsif gender di Majene dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut, serta bagaimana penerapan ARG mungkin meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah. Hasil tinjauan pustaka di atas mengindikasikan bahwa ARG memiliki potensi besar sebagai *policy lever* untuk mempercepat pembangunan inklusif yang berperspektif gender, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konteks pelaksanaan di lapangan.

Dari sisi akademis, kajian mengenai ARG terus berkembang, tetapi masih terdapat **kesenjangan penelitian** khususnya pada pendekatan analisis yang digunakan. Sebagian besar literatur mengenai ARG menitikberatkan pada aspek institusionalisasi ARG ke dalam sistem penganggaran dan PFM, serta evaluasi dampak program ([Polzer et al, 2021](#)). Hingga kini, sangat sedikit penelitian yang menggunakan perspektif *analisis wacana kebijakan* untuk memahami bagaimana ARG diinterpretasikan, dikomunikasikan, dan diimplementasikan oleh aktor-aktor kebijakan di level lokal. Pendekatan analisis wacana diyakini mampu mengungkap dinamika naratif, ide, dan praktik birokrasi di balik proses implementasi ARG, yang mungkin luput dalam pendekatan kuantitatif atau evaluatif tradisional. **Kebaruan** penelitian ini terletak pada penerapan analisis wacana kebijakan terhadap ARG di Kabupaten Majene, yang tidak hanya berfokus pada *output* kebijakan (seperti ada tidaknya program dan anggaran responsif gender), tetapi juga mendalami proses pemaknaan dan praktik pelaksanaannya di birokrasi daerah. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat melengkapi literatur ARG yang ada, sekaligus memberikan perspektif baru tentang bagaimana kebijakan anggaran berkeadilan gender dijalankan dalam konteks lokal Majene.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Kerangka ini memposisikan **ARG** sebagai **input** berupa kebijakan anggaran yang berperspektif gender. Implementasi ARG selanjutnya berlangsung melalui serangkaian **proses** kunci, antara lain: koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, pengumpulan dan pemanfaatan data terpilih yang akurat, peningkatan kapasitas aparatur dalam analisis gender, integrasi mekanisme ARG ke dalam sistem pengelolaan keuangan daerah (*integrasi PFM*), serta penerapan kerangka *Theory of Change* dalam monitoring dan evaluasi (monev) program. Proses-proses tersebut diharapkan menghasilkan **output** berupa program dan kegiatan pembangunan yang **responsif gender** di berbagai sektor. Lebih jauh, output tersebut diorientasikan pada **outcome** peningkatan kesetaraan gender yang terukur melalui berbagai **indikator**. Sebagai ilustrasi, keberhasilan ARG dapat tercermin dari meningkatnya **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** daerah, lebih tingginya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan lokal, serta kontribusi nyata terhadap pencapaian target **SDG 5** (kesetaraan gender) di Kabupaten Majene. Dengan kerangka konseptual ini, penelitian akan menganalisis bagaimana input kebijakan ARG dan proses implementasinya berujung pada output serta outcome yang diharapkan, sehingga dapat teridentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat ARG dalam konteks local.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan metode **analisis wacana kebijakan** yang bersifat kritis. Pendekatan tersebut merujuk pada kerangka analisis wacana argumentatif ala *Hajer* (1995) yang menekankan pada narasi kebijakan (*policy storylines*) dan interaksi antar-aktor dalam memahami isu. Melalui analisis wacana kebijakan, penelitian ini berupaya mendalami bagaimana kebijakan Anggaran Responsif Gender (ARG) diformulasikan, diimplementasikan, dan dikomunikasikan dalam dokumen serta praktik pemerintahan daerah. Pendekatan ini dipilih karena cocok untuk mengungkap kesenjangan antara wacana kebijakan tertulis dengan praktik di lapangan, mengidentifikasi faktor penghambat implementasi, serta menemukan peluang untuk meningkatkan efektivitas kebijakan anggaran berkeadilan gender di Kabupaten Majene.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil **wawancara mendalam** dengan informan kunci, sementara **data sekunder** diperoleh melalui **studi dokumen** dan **observasi lapangan**. Pertama, dilakukan **observasi awal** terhadap konteks penerapan ARG di Majene, untuk mendapatkan gambaran umum dan situasi terkini. Selanjutnya, dilakukan **studi dokumen** kebijakan

Ansari & Basir

Akselerasi Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kebijakan Anggaran Berkeadilan: Pendekatan Gender di Pemerintah Daerah

yang relevan, antara lain dokumen perencanaan daerah (Rencana Pembangunan Daerah/RPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD, Rencana Strategis/Renstra OPD), regulasi terkait ARG dan Pengarusutamaan Gender ([PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2022-2026, 2022](#); [PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENGARASUTAMAAN GENDER, 2021](#)), pedoman pelaksanaan ARG, serta dokumen penganggaran daerah (misalnya *Renja* OPD, RKA, KUA-PPAS). Penelaahan dokumen-dokumen ini bertujuan untuk memahami kerangka kebijakan formal dan sejauh mana prinsip responsif gender terintegrasi di dalamnya.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap para **informan kunci** yang dipilih secara **purposive** (berdasarkan peran strategis mereka dalam ARG) dan dikembangkan dengan teknik **snowball**. Artinya, peneliti menetapkan sejumlah informan awal yang dianggap paling mengetahui topik studi, kemudian dari mereka diperoleh rekomendasi informan lain yang relevan hingga informasi yang dikumpulkan dirasa cukup (data **saturasi** tercapai). Kriteria pemilihan informan mencakup: (a) memiliki pengetahuan mendalam atau keterlibatan langsung dalam penyusunan atau pelaksanaan kebijakan ARG di Kabupaten Majene, dan (b) mewakili berbagai pemangku kepentingan utama (eksekutif pemerintahan, legislatif, serta kelompok masyarakat). Dengan kriteria tersebut, terpilih **5 orang informan kunci** yang terdiri dari pejabat instansi pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Rincian informan kunci tercantum pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan/Bidang	Tempat
1	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Kepala BPKAD Kab. Majene, Kepala Sub-Bidang Anggaran Kab. Majene	Kabupaten Majene
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Majene
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Majene	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)	Kabupaten Majene
4	LSM	LSM yang berfokus pada isu gender dan pemberdayaan perempuan	Kabupaten Majene
5	Kelompok Pemberdayaan Perempuan	Anggota Kelompok	Kabupaten Majene

Sumber: Diolah oleh peneliti

Tabel diatas menunjukkan bahwa informan yang dilibatkan memiliki posisi kunci terkait implementasi ARG. Informan 1-3 merupakan kepala OPD di tingkat Kabupaten yang membidangi

keuangan daerah, perencanaan pembangunan, dan pemberdayaan perempuan, ketiganya berperan penting dalam mendukung dan mensinergikan kebijakan ARG ke pemerintah Kabupaten Majene. Informan 4 adalah anggota legislatif (DPRD Provinsi) yang memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan kebijakan daerah, sehingga dapat memberikan perspektif mengenai dukungan politik dan regulasi terhadap ARG. Informan 5 mewakili **kelompok pemberdayaan perempuan** di masyarakat, yang memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan ARG diartikulasikan dan dirasakan di tingkat komunitas lokal. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan ini memastikan bahwa data yang diperoleh mencakup sudut pandang pemerintah (eksekutif dan legislatif) maupun masyarakat, sehingga analisis dapat lebih komprehensif.

Setiap wawancara berlangsung sekitar **45–60 menit**. Wawancara dilakukan dalam Bahasa Indonesia secara **langsung (tatap muka)** pada lokasi yang disepakati di Kabupaten Majene. Sebelum wawancara, informan diberi penjelasan mengenai tujuan penelitian dan dimintakan kesediaan serta persetujuan partisipasinya. Dengan seizin informan, wawancara direkam untuk mempermudah peneliti dalam melakukan transkripsi dan analisis mendalam. Selain itu, peneliti juga melakukan **observasi lapangan** terbatas, khususnya mengamati **proses integrasi perspektif gender** dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemda Majene (misalnya, mengikuti rapat atau kegiatan sosialisasi ARG apabila memungkinkan). Catatan observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi temuan dari dokumen dan wawancara.

Analisis dilakukan secara iteratif atau berulang menggunakan pendekatan analisis wacana kualitatif. Proses diawali dengan pembacaan awal terhadap seluruh korpus data, termasuk transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen kebijakan, untuk memperoleh pemahaman umum dan mencatat impresi awal serta isu-isu kunci sebagai dasar pembentukan kode awal. Tahap selanjutnya adalah pengodean terbuka, di mana peneliti memberi kode pada data berdasarkan tema yang muncul, seperti representasi isu gender dalam kebijakan, narasi para aktor, peran aktor utama, serta instrumen kebijakan yang digunakan (misalnya GAP dan GBS). Kode-kode tersebut kemudian disusun secara lebih terstruktur melalui pengodean terarah atau tematik, mengacu pada kerangka teori dan fokus studi, sehingga menghasilkan tema-tema seperti desain kebijakan ARG, tata kelola pelaksana, praktik integrasi GAP/GBS dalam siklus anggaran, serta mekanisme akuntabilitas. Setelah itu, peneliti menyusun narasi analitis untuk menggambarkan alur kebijakan ARG, termasuk proses perumusan, pelaksanaan, tantangan yang dihadapi, dan makna kebijakan dari perspektif aktor-aktor terkait. Narasi ini dibangun secara tematik dan kronologis dengan dukungan data empiris dan teori. Untuk menjaga kredibilitas dan keabsahan data, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan metode, melakukan member checking dengan informan, serta menerapkan refleksivitas dalam proses pengodean dan interpretasi. Kombinasi strategi tersebut memastikan bahwa hasil analisis valid, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Creswell, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Gender dalam Kebijakan Anggaran Daerah

Implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kabupaten Majene dimulai dengan pengintegrasian **Gender Analysis Pathway (GAP)** dan **Gender Budget Statement (GBS)** dalam penyusunan dokumen perencanaan (Renja OPD/RKA) dan penganggaran (KUA–PPAS). Kebijakan pendukung berupa **Perda PUG No. 6/2021** dan **Perbup No. 10/2022** telah diterbitkan untuk mendorong pengarusutamaan gender. Namun demikian, **BPKAD** selaku pengelola keuangan daerah menghadapi tantangan besar dalam menerjemahkan konsep responsif gender tersebut ke dalam kebijakan fiskal yang konkret. Informan dari BPKAD mengungkapkan, “*Indikator di SIPD sering tidak mampu menunjukkan dampak kebijakan terhadap perempuan. Data terpisah kami juga masih kurang lengkap, jadi monitoring anggaran responsif gender kurang akurat.*” Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi ARG tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi

sangat dipengaruhi oleh kapasitas **Public Financial Management (PFM)**, desain instrumen (penggunaan GAP/GBS yang efektif), serta integrasi ke siklus anggaran ([Polzer et al., 2021](#)). Temuan ini sejalan dengan [Alisjahbana & Murniningtyas, \(2018\)](#) yang menyatakan bahwa banyak pemerintah daerah telah memiliki regulasi terkait ARG, tetapi pemahaman dan penerapan yang tidak merata di antara pemangku kepentingan masih menjadi hambatan utama. Dengan kata lain, **tagging** atau pelabelan program sebagai program responsif gender saja belum menjamin efektivitas; konsistensi implementasi dan pemahaman mendalam dari setiap OPD jauh lebih menentukan keberhasilan ARG di tahap pelaksanaan anggaran.

Di sisi lain, meskipun anggaran yang terintegrasi dengan gender sudah diterapkan di level awal, pada tahap selanjutnya sering terjadi kesulitan dalam penyelarasan Penyelarasan lintas-OPD masih menantang. Alokasi pada sektor pendidikan dan kesehatan perempuan tidak selalu selaras dengan sektor beranggaran besar seperti infrastruktur/ekonomi. Koordinasi lintas-sektor yang lemah kerap mengurangi efektivitas ARG ([Jorge et al., 2023](#); [O'Hagan & Nesom, 2023](#)).

Koordinasi Lintas OPD dan Tantangan Implementasi

Koordinasi antar-OPD merupakan elemen krusial yang memengaruhi kesuksesan penerapan ARG. Meskipun forum koordinasi seperti **Pokja PUG** (Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender) sudah dibentuk untuk evaluasi dan pengawasan kebijakan ARG, faktanya koordinasi lintas sektor masih sangat terbatas. Penyelarasan program antar bidang, misalnya antara sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, sering tidak berjalan mulus. **Tanpa koordinasi yang kuat, ARG berisiko menjadi sekadar kepatuhan administratif (compliance-driven) dan tidak banyak memengaruhi outcome pembangunan.** Hal ini tercermin dari pernyataan seorang informan kunci di Bappeda, *“Beberapa OPD masih menganggap ARG ini sekadar memenuhi administrasi saja, bukan kebutuhan nyata. Koordinasi jadi sulit karena mereka belum melihat isu gender sebagai prioritas.”* Kondisi ini selaras dengan temuan [Jorge et al. \(2023\)](#) dan [López-Hernández et al., \(2023\)](#) bahwa tanpa koordinasi lintas sektor, implementasi gender budgeting cenderung terfragmentasi dan kurang berdampak. [Sudirman, F.A., Susilawaty \(2022\)](#) juga menegaskan pentingnya koordinasi antar sektor untuk memastikan ARG tidak berhenti di tataran dokumen, tetapi benar-benar terintegrasi dalam pelaksanaan program di berbagai OPD. Dengan demikian, diperlukan upaya memperkuat mekanisme koordinasi lintas-OPD agar ARG tidak berjalan secara parsial di masing-masing sektor. Keterlibatan aktif sektor non-sosial (misalnya infrastruktur dan ekonomi) perlu ditingkatkan, karena saat ini sektor-sektor tersebut relatif belum mempertimbangkan perspektif gender dalam alokasi anggaran mereka.

Selain koordinasi, keterbatasan **data terpilah** dan **kapasitas SDM** turut menjadi hambatan utama dalam implementasi ARG. Dalam wawancara dengan DP3A terungkap bahwa data mengenai indikator gender sering kali tidak tersedia dalam format yang terstandarisasi, sehingga menyulitkan evaluasi kebijakan. Informan pada DP3A mengeluhkan, *“Data terpilah tentang kunjungan kesehatan, pelatihan UMKM perempuan, atau penerima bantuan sosial sering kali tidak tersedia dalam format baku, jadi kami kesulitan melakukan analisis yang mendalam.”* Konfirmasi di lapangan pun menunjukkan bahwa banyak data kegiatan masih bersifat agregat dan kurang sensitif gender. Para informan menyarankan beberapa solusi, antara lain: penguatan pendampingan teknis melalui pelatihan analisis gender bagi aparatur setiap OPD, penerapan GBS secara konsisten di setiap tahap perencanaan, serta pengembangan sistem data terpilah yang lebih baik (memuat variabel jenis kelamin, usia, disabilitas, dll.) untuk meningkatkan akurasi monitoring. Upaya tersebut sejalan dengan rekomendasi [Listiawati et al. \(2025\)](#) yang menekankan perlunya standardisasi data terpilah sebagai dasar monitoring dan evaluasi kebijakan berbasis gender yang lebih efektif.

Perubahan Desain Program dan Kebijakan Berkeadilan Gender

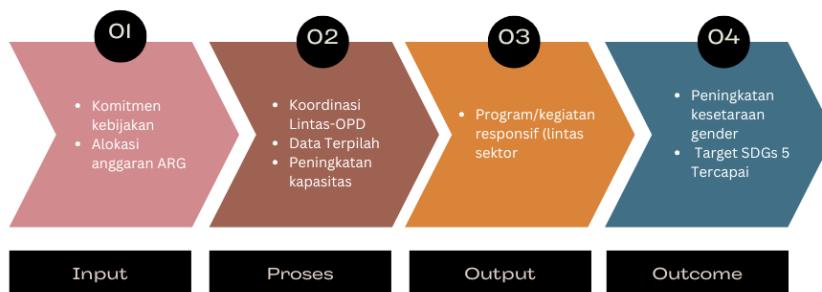
Integrasi ARG mulai mendorong perubahan nyata pada desain program pembangunan daerah agar lebih berkeadilan gender. Perubahan paling signifikan tampak di sektor **kesehatan** dan **pendidikan**, di mana program dan layanan mulai disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perempuan. Seorang pejabat Dinas Kesehatan mencontohkan hasil adaptasi di sektor kesehatan: *“Kami sudah menyesuaikan jam layanan ibu dan anak di puskesmas agar lebih mudah diakses oleh perempuan berpenghasilan rendah. Alur layanan pun sekarang lebih ramah perempuan.”* Contoh konkret ini menegaskan bahwa **gender responsive budgeting** bukan hanya soal realokasi anggaran untuk perempuan, tetapi juga perubahan desain intervensi program guna memastikan tercapainya **outcome** kesetaraan gender. Hal ini konsisten dengan pendapat [Khusaini, M., & Ashar, K. \(2021\)](#) bahwa *pro-gender budgeting* harus diiringi penyesuaian program, bukan sekadar pembagian anggaran yang setara, agar tujuan **SDG 5 (Kesetaraan Gender)** dapat dicapai. Studi [Martínez Guzmán \(2024\)](#) tentang praktik ARG di negara lain juga menyiratkan bahwa perubahan pada tahap perencanaan program (misalnya jam layanan fleksibel, prioritas bagi kelompok rentan, fasilitas ramah perempuan) akan meningkatkan efektivitas ARG dalam jangka panjang.

Di Kabupaten Majene, beberapa program daerah memang telah bertransformasi menjadi lebih inklusif gender, terutama yang menyasar **kesehatan ibu-anak** dan **pendidikan perempuan**. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perempuan sebagai individu, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Kendati demikian, perubahan desain program ini belum merata di semua sektor. Sektor lain seperti infrastruktur dan ekonomi masih cenderung menjalankan program secara *business-as-usual* tanpa pertimbangan khusus terhadap kesenjangan gender. Informan mengakui bahwa **kurangnya pemahaman** tentang analisis gender di OPD non-sosial, ditambah **terbatasnya SDM** yang kompeten di bidang ini, menjadi hambatan dalam memperluas praktik ARG ke seluruh sektor. *“Tidak semua staf kami benar-benar paham menerapkan analisis gender, dan belum ada personel khusus yang ditugasi. Akibatnya, program lebih inklusif bagi perempuan sulit dijalankan secara konsisten,”* ungkap salah satu pejabat OPD teknis mengenai kondisi kapasitas internal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas (*capacity building*) yang menjangkau seluruh OPD serta komitmen pimpinan tiap perangkat daerah untuk menjadikan kesetaraan gender sebagai arus utama di sektor masing-masing. Beberapa informan menyarankan agar **Bappeda** bersama DP3A lebih proaktif memberikan pendampingan lintas sektor, sehingga setiap OPD memahami manfaat ARG dan tidak melihatnya semata sebagai kewajiban administrasi. Pendekatan ini diharapkan mencegah ARG terfragmentasi hanya di OPD tertentu ([Simčić & Vašiček, 2023](#)), melainkan menjadi gerakan kolektif dalam pembangunan daerah.

Peran Bappeda dan Pencapaian SDGs

Sebagai institusi perencana, **Bappeda** berperan sentral dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam arah pembangunan daerah. Dalam dokumen **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023–2026**, Bappeda telah menerapkan *gender lens* dengan menautkan program prioritas lintas sektor kepada matriks indikator **Sustainable Development Goals (SDGs)**, khususnya SDG 5 tentang kesetaraan gender. Artinya, setiap program diupayakan berkontribusi pada target peningkatan pemberdayaan perempuan. Untuk memetakan hubungan antara **input** anggaran ARG dan **outcome** yang berfokus pada perempuan, Bappeda mengadopsi kerangka **Theory of Change (ToC)** dalam perencanaan dan evaluasi. Namun, aplikasi ToC sejauh ini masih dominan menggunakan indikator **kuantitatif** dan kurang menangkap perubahan **kualitatif** yang lebih mendalam, seperti perubahan kapasitas agensi perempuan, kualitas partisipasi, atau pengurangan hambatan struktural. Seorang perencana di Bappeda menjelaskan, *“Kami memakai kerangka Theory of Change untuk mengaitkan input anggaran dengan outcome, tetapi indikator kami masih didominasi angka-angka kuantitatif. Sulit sekali menangkap perubahan kualitatif seperti peningkatan pemberdayaan atau partisipasi”*

perempuan dengan indikator yang ada.” Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi ARG di Majene masih berfokus pada capaian tangibles (seperti jumlah program atau terserapnya anggaran untuk kegiatan berlabel gender) dan belum sepenuhnya menyentuh aspek perubahan sosial. Temuan ini konsisten dengan laporan [OECD \(2023\)](#) dan [Leal Filho et al. \(2023\)](#) yang mencatat bahwa banyak inisiatif ARG cenderung terukur dari output kuantitatif, sementara dampak riil pada peningkatan kesejahteraan perempuan belum tergambar. Bappeda sendiri menyadari keterbatasan ini; salah satu tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah **ketersediaan data terpilah yang akurat dan konsisten** untuk mengukur dampak. “*Terus terang, ketersediaan data terpilah masih menjadi kendala terbesar kami dalam menelusuri dampak kebijakan terhadap perempuan,*” imbuh informan Bappeda tersebut. Data dari BPS maupun OPD sektoral yang ada sering kali kurang lengkap atau tidak konsisten antar tahun, sehingga analisis longitudinal terhadap outcome gender menjadi sulit. Oleh karena itu, Bappeda berencana meningkatkan kualitas pencatatan data terpilah dan mendorong penggunaan indikator kualitatif (misalnya indikator pemberdayaan) dalam kerangka monitoring dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan rekomendasi [UN Women \(2024\)](#) untuk memasukkan ukuran-ukuran kualitatif dalam evaluasi gender budgeting agar capaian **outcome** lebih komprehensif.



Gambar 2. Diagram Theory of Change Implementasi ARG untuk Pencapaian SDGs

Sumber: Diolah oleh peneliti

Upaya Bappeda mengintegrasikan ARG dengan kerangka ToC seperti pada **Gambar** di atas menunjukkan komitmen pada level perencanaan strategis. Ke depan, penguatan diperlukan pada tahap implementasi dan evaluasi, yaitu dengan memastikan **mekanisme monitoring partisipatif** yang melibatkan pemangku kepentingan (termasuk kelompok perempuan) dan menggunakan indikator-indikator yang mampu menangkap perubahan kualitatif. Dengan demikian, kontribusi ARG terhadap pencapaian SDGs—khususnya SDG 5—dapat terukur tidak hanya dari sisi keluaran program, tetapi juga dampak nyata dalam pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan.

Koordinasi Lintas OPD dan Tantangan Implementasi

Koordinasi antar-OPD merupakan elemen krusial yang sangat memengaruhi keberhasilan penerapan ARG. Meskipun forum koordinasi seperti **Pokja PUG** telah dibentuk untuk evaluasi dan pengawasan kebijakan ARG, kenyataannya koordinasi lintas-OPD masih sangat terbatas. Terutama dalam menyelaraskan program sektor kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan, sinergi antarlembaga belum optimal. Tanpa koordinasi yang kuat, ARG berisiko hanya menjadi pemenuhan formalitas (*compliance-driven*) dan tidak benar-benar memengaruhi *outcome* pembangunan ([López-Hernández et al., 2023](#)). Kondisi ini sejalan dengan temuan [Sudirman, F.A., & Susilawaty, \(2022\)](#) yang menyebutkan bahwa koordinasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan *gender budgeting* berjalan efektif dan tidak terfragmentasi dalam pelaksanaannya.

Sebagai ilustrasi, meskipun sektor kesehatan dan pendidikan di Majene telah mulai menjalankan program-program yang berperspektif gender, beberapa sektor lain yang lebih berfokus pada infrastruktur atau ekonomi masih kurang mempertimbangkan dampak gender dalam alokasi anggarannya. Keberhasilan pengintegrasian ARG di Kabupaten Majene sangat bergantung pada kemampuan untuk memasukkan perspektif gender ke seluruh sektor, bukan hanya sektor yang secara langsung terkait dengan perempuan. Untuk meningkatkan dampak kebijakan, diperlukan kerjasama lintas-OPD yang lebih erat, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan hingga evaluasi.

Hambatan dan Solusi dalam Implementasi ARG

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa **hambatan utama** dalam implementasi ARG di Kabupaten Majene. Pertama adalah **terbatasnya data terpilah** yang memadai; kedua, **kapasitas SDM** yang belum merata dalam melakukan analisis gender pada perencanaan dan penganggaran. Dalam wawancara, informan dari DP3A mengungkapkan bahwa data mengenai program untuk perempuan sering kali tidak tersedia dalam format yang dibutuhkan. **Menurut informan DP3A:** "Data kunjungan kesehatan atau penerima bantuan sosial masih belum dipisahkan menurut jenis kelamin. Hal ini menyulitkan kami untuk menganalisis keberhasilan program-program ARG secara lebih terperinci."

Ketiadaan data terpilah yang konsisten di berbagai OPD menyebabkan evaluasi terhadap keberhasilan program berkeadilan gender menjadi kurang akurat. Selain masalah data, keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur yang memahami perspektif gender juga menghambat integrasi ARG ke dalam program kerja. Beberapa OPD belum memiliki staf atau tim teknis yang mampu melakukan *gender analysis* secara mandiri, sehingga sering bergantung pada pendampingan DP3A atau Bappeda.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, para informan menyarankan sejumlah **solusi praktis**. Solusi pertama adalah penguatan *capacity building* bagi aparatur melalui pelatihan teknis tentang analisis gender dan penyusunan GBS di setiap OPD. Pendampingan intensif diperlukan agar setiap instansi tidak sekadar **copy-paste** GAP/GBS, tetapi benar-benar memahami langkah-langkah analisis gender. **Seorang informan DP3A menekankan pentingnya upaya ini** "Setiap OPD sebaiknya mendapat pendampingan teknis rutin. Pelatihan analisis gender dan penyusunan GBS perlu dilakukan agar semua OPD benar-benar paham dan mampu menerapkannya.". Solusi kedua adalah pengembangan **standar data** yang terintegrasi. Pemerintah daerah perlu menetapkan format pengumpulan data yang seragam, yang mencakup variabel jenis kelamin, usia, disabilitas, dan karakteristik penting lainnya pada setiap program/kegiatan. Dengan standar ini, data dari berbagai OPD dapat dihimpun dan dibandingkan dengan mudah untuk keperluan monitoring dan evaluasi berbasis gender. Temuan [Listiawati et al. \(2025\)](#) turut mendukung hal ini, bahwa standar data dan sistem informasi yang terpadu akan sangat membantu meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kebijakan berbasis gender. Selain itu, peningkatan koordinasi (seperti membangun *dashboard* data terpilah lintas OPD) dan komitmen pimpinan daerah untuk menjadikan ARG sebagai prioritas pengawasan juga disebut sebagai langkah penting agar solusi-solusi di atas dapat berjalan efektif.

Dampak dan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi terhadap **dampak kebijakan ARG** di Kabupaten Majene sejauh ini masih terbatas dan perlu diperkuat. Saat ini, pemantauan lebih banyak berfokus pada capaian **kuantitatif** seperti penyerapan anggaran dan jumlah program/kegiatan yang berlabel responsif gender. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun sudah ada perubahan desain program yang lebih berpihak pada

perempuan, evaluasi yang menggali **outcome** nyata bagi kesetaraan gender masih minim. Belum banyak data mengenai perubahan kondisi perempuan akibat program ARG yang terdokumentasi secara sistematis, misalnya apakah ada peningkatan akses perempuan terhadap layanan dasar, peningkatan kesejahteraan ekonomi perempuan, atau kenaikan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai hasil implementasi ARG.

Dengan kata lain, apakah ARG sudah berhasil memberdayakan perempuan dan kelompok rentan secara **kualitatif** belum dapat dijawab sepenuhnya oleh evaluasi saat ini. Hal ini sejalan dengan pandangan [Sudirman, F.A., & Susilawaty \(2022\)](#) bahwa diperlukan **indikator kinerja berbasis gender** yang lebih tajam dalam evaluasi kebijakan, agar manfaat kebijakan dapat terukur secara adil bagi perempuan. Ke depan, evaluasi ARG semestinya tidak hanya menilai **output** (berapa banyak anggaran terserap untuk program gender), tetapi lebih pada **outcome** (sejauh mana kesenjangan gender berkurang). Bappeda dan DP3A perlu berkolaborasi menyusun indikator dampak yang dapat menangkap perubahan dalam pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan, misalnya indikator peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi, penurunan kekerasan berbasis gender, atau perubahan norma yang lebih mendukung kesetaraan. Dengan memperkaya evaluasi ke aspek-aspek tersebut, diharapkan umpan balik kebijakan menjadi lebih komprehensif sehingga ARG dapat terus disempurnakan.

Triangulasi Temuan

Untuk memastikan validitas, temuan penelitian ini telah diverifikasi melalui **triangulasi** berbagai sumber data (dokumen kebijakan, hasil wawancara, dan observasi lapangan). Matrik berikut menunjukkan bagaimana data dari **dokumen** resmi dibandingkan dengan perspektif **informan** serta hasil **observasi**, sehingga memberikan gambaran utuh yang saling menguatkan:

Tabel 2. Matriks Triangulasi Temuan

Aspek Temuan	Bukti dari Dokumen	Temuan Wawancara	Hasil Observasi
Integrasi Gender dalam Perencanaan Anggaran	Terdapat landasan hukum (Perda PUG No.6/2021, Perbup No.10/2022) yang mewajibkan pengintegrasian GAP dan GBS dalam siklus perencanaan anggaran. Dokumen Renja dan KUA-PPAS mencantumkan penggunaan GAP/GBS.	Informan mengonfirmasi bahwa GAP dan GBS telah diadopsi dalam proses penganggaran. Namun, beberapa pemangku kebijakan masih belum memahami konsep ARG secara mendalam, sehingga penerapannya sering sebatas formalitas.	Observasi terhadap dokumen perencanaan menunjukkan format GAP/GBS sudah disertakan, tetapi pengisianya tidak konsisten antar-OPD. Terlihat beberapa OPD belum sepenuhnya mengikuti panduan analisis gender dalam proposal program mereka.
Koordinasi Lintas OPD	Pembentukan Pokja PUG tercantum dalam regulasi sebagai mekanisme koordinasi lintas OPD untuk pelaksanaan PUG/ARG.	Informan DP3A menyatakan koordinasi antarlembaga masih lemah; banyak OPD kurang aktif dalam Pokja PUG dan kurang	Observasi lapangan (rapat Pokja PUG) menunjukkan partisipasi OPD variatif dan cenderung rendah. Kolaborasi

	Tugas dan fungsi tiap OPD terkait PUG dijelaskan di dokumen petunjuk teknis.	sinkron dalam menyelaraskan program gender. Beberapa OPD sektor ekonomi/infrastruktur belum mengintegrasikan perspektif gender sesuai harapan.	antar dinas belum efektif, misalnya agenda pertemuan Pokja tidak rutin atau dihadiri perwakilan berlevel rendah yang kurang dapat mengambil keputusan.
Perubahan Desain Program	Dokumen perencanaan sektor kesehatan dan pendidikan mencantumkan program yang disesuaikan untuk perempuan (contoh: peningkatan layanan kesehatan ibu-anak, beasiswa untuk anak perempuan, dsb). Kebijakan teknis (petunjuk pelaksanaan) program mencerminkan penjabaran kebutuhan spesifik gender.	Informan (mis. dari sektor kesehatan) mengungkapkan telah menyesuaikan jam layanan posyandu dan puskesmas agar lebih fleksibel bagi ibu bekerja. Program beasiswa pendidikan juga diarahkan bagi anak perempuan dari keluarga kurang mampu. Mereka merasakan ada dukungan anggaran untuk kegiatan pro-perempuan dibanding tahun-tahun sebelumnya.	Observasi di fasilitas kesehatan menunjukkan adanya upaya penyesuaian jam layanan (misal klinik buka lebih sore hari). Di lapangan tampak beberapa program khusus perempuan berjalan (pelatihan keterampilan untuk perempuan, dll.). Namun, belum semua program di luar sektor kesehatan/pendidikan terlihat berperspektif gender.
Peran Bappeda dan Keterkaitan dengan SDGs	RPD 2023–2026 memasukkan prinsip kesetaraan gender dan mengaitkan target daerah dengan SDGs (Tujuan 5 tentang gender equality). Dokumen matriks SDGs daerah memperlihatkan program dari berbagai OPD dipetakan kontribusinya ke target SDGs.	Informan Bappeda menjelaskan pihaknya menggunakan pendekatan ToC untuk memastikan setiap program berkontribusi ke outcome SDG 5. Namun, mereka mengakui kendala data: indikator yang tersedia sebagian besar kuantitatif sehingga sulit mengukur perubahan kualitatif (pemberdayaan, partisipasi) perempuan.	Observasi terhadap dokumen evaluasi pembangunan menunjukkan bahwa pelaporan capaian SDGs di tingkat daerah masih fokus pada angka agregat (misal persentase anggaran responsif gender, jumlah kegiatan terkait SDG 5). Belum ditemukan laporan kualitatif terukur tentang perubahan kondisi perempuan. Dalam rapat evaluasi, isu data terpilih sering muncul sebagai

kendala pembahasan.			
Hambatan & Solusi Implementasi	Laporan internal dan notulen rapat PUG daerah mencatat kendala seperti kurangnya data terpilah dan keterbatasan tenaga terlatih di OPD. Rencana aksi daerah PUG menytinggung perlunya peningkatan kapasitas dan perbaikan data, meski belum rinci.	Informan DP3A menekankan sulitnya analisis karena data program tidak dipisah menurut jenis kelamin. Ia juga mengusulkan pelatihan analisis gender bagi semua OPD dan pembuatan standar data terpadu sebagai solusi. Informan lain setuju bahwa tanpa peningkatan SDM dan data, ARG sulit efektif.	Observasi menunjukkan data laporan OPD kebanyakan masih agregat (tidak dibedakan jender). Contohnya, laporan bantuan UMKM tidak membedakan penerima perempuan dan laki-laki. Terlihat pula beberapa staf perencana bingung menerapkan GAP/GBS, mengindikasikan perlunya pendampingan teknis. Setelah pendampingan oleh DP3A/Bappeda, ada sedikit perbaikan dalam pengisian data terpilah di beberapa OPD.
Dampak dan Evaluasi	Hingga saat ini belum ada dokumen khusus yang merangkum evaluasi dampak ARG terhadap kesetaraan gender. Laporan kinerja pemerintah daerah lebih banyak menyoroti serapan anggaran dan output kegiatan. Indikator IPG tercantum sebagai makro outcome, tetapi tidak diuraikan kontribusi program ARG terhadap peningkatannya.	Informan Bappeda mengakui evaluasi formal belum mendetail soal dampak: "Kami tahu program berjalan, tapi sulit mengklaim sudah berdampak pada peningkatan kesejahteraan perempuan tanpa data," ujarnya. Para pemangku kepentingan sepakat perlu indikator kinerja gender yang lebih spesifik untuk evaluasi.	Dari observasi kegiatan <i>monitoring</i> dan <i>review</i> program, diskusi berfokus pada capaian fisik dan keuangan. Belum ada mekanisme rutin untuk meninjau perubahan sosial akibat program (misal cerita sukses perempuan penerima manfaat). Hal ini konsisten dengan pengamatan bahwa evaluasi bersifat administratif dan belum menyentuh tingkat komunitas.

Sumber: Diolah oleh peneliti

Pada matriks di atas, tampak bahwa **data dari dokumen** kebijakan memberikan kerangka formal dan target yang ingin dicapai pemerintah daerah, sementara **wawancara dengan informan kunci** mengungkap kondisi implementasi sebenarnya termasuk kendala-kendala yang dihadapi. Hasil **observasi lapangan** turut mengonfirmasi temuan tersebut, misalnya dengan melihat bagaimana kebijakan dijalankan dan apa saja yang belum optimal. Melalui triangulasi ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara regulasi ARG di Majene sudah diakomodasi, tantangan praktis seperti koordinasi lintas OPD, kapasitas sumber daya, dan ketersediaan data memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan kesetaraan gender. Triangulasi temuan juga memastikan bahwa analisis penelitian ini lebih terpercaya (*trustworthy*), karena setiap isu telah dikaji dari berbagai sudut pandang sumber data yang saling mendukung.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kabupaten Majene, terutama melalui integrasi *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang mendorong perubahan desain program sektor kesehatan dan pendidikan menjadi lebih inklusif dan responsif gender. Namun, efektivitas implementasi ARG masih terkendala oleh keterbatasan data terpilah yang belum memadai, kapasitas analisis gender aparatur yang belum merata, lemahnya koordinasi lintas-OPD, serta evaluasi yang lebih terfokus pada indikator kuantitatif tanpa menggali dampak kualitatif terhadap kesejahteraan perempuan, sehingga komitmen formal belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik kebijakan fiskal. Temuan ini menegaskan potensi ARG sebagai instrumen percepatan pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Namun agar potensi tersebut memberikan dampak nyata diperlukan peningkatan evaluasi berbasis gender, penguatan regulasi lokal, dan mekanisme pemantauan partisipatif berbasis bukti, sehingga implementasi ARG diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain cakupan data yang terbatas (hanya dokumen kebijakan dan wawancara kunci), metode kualitatif semata, serta fokus pada satu lokasi studi yang membatasi generalisasi temuan

SARAN

1. Saran Praktis : Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan literasi gender aparatur, dan mengoptimalkan pemanfaatan data terpilah yang akurat agar integrasi GAP dan GBS dalam perencanaan anggaran lebih efektif.
2. Saran Teoritis : Penelitian selanjutnya sebaiknya mengadopsi metode campuran/*mix method* (kuantitatif dan kualitatif), memperluas sumber data (misalnya survei besar atau studi longitudinal), serta melakukan studi komparatif lintas-daerah untuk meningkatkan validitas dan kemampuan generalisasi temuan.

REFERENSI

- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *BERKELANJUTAN DI INDONESIA* : UNPAD PRESS. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6038>
- Ansari, M. I., & Basir, I. (2024). *Jurnal Proaksi Gender Perspective In Budget Planning : A Phenomenological Study On The Preparation Of The Regional Budget In Majene Regency*. 11(3), 611–625. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i3.6269>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. (2023). *Indeks Pembangunan Gender* (Vol. 3). <https://www.timeanddate.com/>

Ansari & Basir

Akselerasi Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kebijakan Anggaran Berkeadilan: Pendekatan Gender di Pemerintah Daerah

- Brundtland, G. H. (1987). Our Common Future—Call for Action. *Environmental Conservation*, 14(4), 291–294. <https://doi.org/10.1017/S0376892900016805>
- Creswell, J. w. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (2nd ed.). Sage Publications.
- Darwanis. (2015). Analisis Anggaran Responsif Gender sebagai Percepatan Pencapaian Target MDGs. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3). <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6038>
- Dello Strologo, A., D'Andrassi, E., & Ventimiglia, F. (2023). *The Prioritization of the SDGs: Analysis of European Policies in Favor of Gender Equality BT - When the Crisis Becomes an Opportunity: The Role of Women in the Post-Covid Organization* (P. Paoloni & R. Lombardi (eds.); pp. 243–254). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21932-0_16
- Instruksi Presiden Tentang Pengarusutaman Gender Dalam Pembangunan Nasional, Nomor 9 Tahun 2000 (2000).
- Jorge, S., Coelho, L., & Pimentel, L. (2023). The institutional environment of gender budgeting: Learning from the Portuguese experience. *Public Money & Management*, 43(6), 576–585. <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2165274>
- Khalifa, R., & Scarparo, S. (2021). Gender Responsive Budgeting: A tool for gender equality. *Critical Perspectives on Accounting*, 79, 102183. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cpa.2020.102183>
- Khusaini, M., Ashar, K., G. M. (2021). *Manajemen Belanja Daerah*. UB Press.
- Leal Filho, W., Kovaleva, M., Tsani, S., Tîrcă, D.-M., Shiel, C., Dinis, M. A. P., Nicolau, M., Sima, M., Fritzen, B., Lange Salvia, A., Minhas, A., Kozlova, V., Doni, F., Spiteri, J., Gupta, T., Wakunuma, K., Sharma, M., Barbir, J., Shulla, K., ... Tripathi, S. (2023). Promoting gender equality across the sustainable development goals. *Environment, Development and Sustainability*, 25(12), 14177–14198. <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02656-1>
- Listiawati, N., Ansari, M. I., Novitasari, E., & Fitri, D. N. (2025). *Village Sustainable Development Goals (Sdgs): Budgetary, Human Resources, And Technology Contributions*. 9, 557–565. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2522>
- López-Hernández, A. M., Romero-Ramos, L., Flórez-Parra, J. M., & López-Pérez, M. V. (2023). External control of gender budget implementation: Experience of the Audit Office of Andalusia. *Public Money & Management*, 43(6), 559–566. <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2185416>
- Martínez Guzmán, J. P. (2024). Can gender-responsive budgeting change how governments budget?: Lessons from the case of Ecuador. *Public Administration*, 102(2), 388–404. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/padm.12926>
- Mishra, M., Desul, S., Santos, C. A. et al. (2023). A bibliometric analysis of sustainable development goals (SDGs): a review of progress, challenges, and opportunities . *Environment, Development and Sustainability*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03225-w>
- Morshed, M. S., & Lim, S. (2023). Gender-responsive budgeting within the medium-term budgetary framework in Bangladesh. *Public Money & Management*, 43(6), 586–589. <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2165730>
- Nurhaeni, I. D. A. (2017). Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). In *Gender analysis pathway (GAP) dan gender budget statement (GBS)*. Australia Indonsia Partnership for Decentralisation (AIPD).
- O'Hagan, A., & Nesom, S. (2023). Watching the neighbours: gender budgeting in Scotland and Wales. *Public Money & Management*, 43(6), 567–575. <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2165275>
- OECD. (2023). *Gender Budgeting in OECD Countries 2023*. OECD Publishing. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/647d546b-en>

- Oppi, C., Cavicchi, C., & Vagnoni, E. (2021). The Journey to Gender-Responsive Budgeting: Lessons Learned from Higher Education. In *Sustainability* (Vol. 13, Issue 4). <https://doi.org/10.3390/su13042019>
- Pahlevi, M.A.A., & Alfirdaus, L. K. (2018). ANALISIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2016. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(4), 81–90. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21626>
- PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARASUTAMAAN GENDER KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2022-2026 (2022).
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENGARASUTAMAAN GENDER, 140 Fisheries Research 6 (2021). <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo de Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOLOGICA%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2013.04.005%0Ahttps://doi.org/10.1038/s41598>
- Polzer, Tobias, Nolte, Isabella M, & Seiwald, Johann. (2021). Gender budgeting in public financial management: a literature review and research agenda. *International Review of Administrative Sciences*, 89(2), 450–466. <https://doi.org/10.1177/00208523211031796>
- Pratama, M.A., Taufiqurokhman., Yusuf, M. (2024). Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Lingkungan : Menuju Pembangunan Berkelanjutan Synergy of Economic and Environmental Policies : Towards Sustainable Development Abstrak. *Pencerah Publik*, 11(2), 50–61. <https://doi.org/10.33084/pencerah.v11i2.8731>
- Simčić, A. M. S., & Vašiček, D. (2023). Gender responsive budgeting: The case of Croatia. *Public Money & Management*, 43(6), 543–550. <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2185415>
- Siswiraningtyas, A. N., & Yuhertiana, I. (2021). Implementation Gender-Responsive Budget: The Constraints and Their Coping Strategies. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(1), 10–19. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n1.p10-19>
- Steccolini, I. (2019). New development: Gender (responsive) budgeting—a reflection on critical issues and future challenges. *Public Money & Management*, 39(5), 379–383. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1578538>
- Sudirman, F.A., Susilawaty, F. T. (2022). KESETARAAN GENDER DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) : SUATU REVIUW LITERATUR SISTEMATIS. *Publicuho*, 5(4), 995–1010. <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.41>
- UN, DESA. (2024). *The Sustainable Development Goals Report 2024 (The Sustai)*. United Nations. <https://doi.org/https://doi.org/10.18356/9789213589755>
- UNESCO. (2019). *UNESCO Priority Gender Equality Action Plan_ 2014-2021, 2019 revision - UNESCO Digital Library.pdf*.
- United Nations. (2020). *The Sustainable Development Goals Report*.
- Widowati, G. R., Ludigdo, U. & Kamayanti, A. (2016). Persepsi Penyusun Anggaran Mengenai Konsep Kebijakan Anggaran Responsif Gender. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.18382/jraam.v2i1.67>